

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat memiliki banyak harapan terhadap pemerintah saat ini termasuk kebutuhan akan layanan masyarakat melalui teknologi dan informasi, sebagai pemenuhan tuntutan tersebut maka, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat. Salah satu pemerintah menggunakan sistem pemerintahan berbasis teknologi. Era digital pada saat ini, sangat penting untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di setiap bidang kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah telah mendorong setiap tingkat pemerintahan untuk menerapkan sistem *electronic government* atau dikenal dengan *E-Government* (*e-gov*) sejak Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi yang pesat guna memenuhi tuntutan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan meningkatkan standar pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi (Rahmawati, 2020). Penerapan *E-Government* di tingkat desa, diharapkan birokrasi yang rumit dapat berkurang dan proses administrasi dapat dipercepat.

Penggunaan *E-Government* pada pemerintah dapat melakukan perubahan modern dalam penyelenggaraan pemerintah. Upaya tersebut

sebagai solusi untuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. *E-Government* juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dalam meningkatkan proses transparansi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan (Ramdani, 2018). Kemajuan teknologi, diharapkan birokrasi menjadi lebih efisien karena kinerja pemerintah dapat diubah lebih cepat dan lebih fokus pada proses (Indrajit, 2006). Menurut Simon (2003), perkembangan internet akan memperkuat demokrasi dan menyebarkan nilai-nilai demokratis ke seluruh dunia. Akses internet yang mudah untuk mendapatkan informasi sangat membantu masyarakat dalam mencapai keseimbangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga besar lainnya, karena internet dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan pemerintah agar dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Peningkatan pelayanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi serta persyaratan keterbukaan dalam kinerja dan pelayanan pemerintah merupakan tujuan utama *E-Government*. *E-Government* lebih dari sekedar situs web di internet yang mencakup banyak fungsi, mencakup prosedur dan kerangka kerja yang memudahkan masyarakat negara dan pemerintah untuk berkomunikasi secara digital. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi dan pemerintahan. Sistem *E-Government* telah digunakan sebagai cara bagaimana

pemerintah di banyak kota, desa, dan kabupaten di Indonesia menggunakan teknologi informasi untuk memberikan layanan publik.

Kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk lebih responsif akan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip *good democratic governance*, penyediaan layanan oleh penyelenggara pemerintah daerah yang merupakan tanggungjawab dari kegiatan tersebut. Pelaksanaan harus sesuai dengan harapan masyarakat yang menuntut peningkatan kualitas layanan publik dalam memberikan capaian kepuasan masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya sebuah inovasi layanan publik pada pemerintahan berbasis digital atau *electronic government* yang terus diuntuk oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan standar dan efektivitas layanan (Tasyah et al., 2021). Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah atau disebut sebagai *electronic government* sebagai alat fasilitas aksesibilitas masyarakat terhadap kebijakan pemerintah untuk kelancaran kegiatan yang dirancang pemerintah. Situs internet atau situs *web* dalam penerapan *E-Government*, pemerintah memegang peranan yang sangat penting yang merupakan perkembangan teknologi telekomunikasi. Penggunaan teknologi informasi untuk dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sebuah pelayanan.

Namun, penerapan *electronic government* tersebut memiliki hambatan dalam penerapannya di setiap daerah. Misalnya pada keterjangkauan aksesibilitas internet atau keterbatasan telekomunikasi, dimana setiap daerah memiliki batas kemampuan yang berbeda, sehingga pemerataan infrastuktur

digital menjadi masalah yang membutuhkan waktu penyelesaiannya, terlebih pada daerah terpencil yang minim akses internet. Kurangnya pemahaman pengguna tentang layanan publik berbasis digital, dan ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, serta sebuah situs *website* pemerintah yang menerapkan sistem informasi layanan berbasis teknologi atau digital yang tentunya membutuhkan penggunaan akses internet (Nurlaila et al., 2024).

Setiap desa diharuskan untuk memiliki *website* sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan pengelolaan data pembangunan desa. Dimana di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa termuat bahwa setiap desa harus memiliki sistem informasi yang mencakup *website* atau jaringan informasi. Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa, diharuskan dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat. Situs *website* merupakan salah satu cara komunikasi pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan standar efektivitas layanan publik sebagai penerapan dari *e-government* (Nurmandi et al., 2020). Pada pasal 86 ayat (2), (4), dan (5) menyatakan Sistem Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan desa.

Website desa juga menjadi sarana akuntabilitas dan transparansi publik serta promosi potensi, baik wisata maupun produk unggulan desa. Perhatian terhadap penanganan efektivitas penerapan *e-government* oleh pemerintah

desa memiliki urgensi tersendiri yang mengacu pada bukti kesiapan daya saing pemerintah desa, dalam pemanfaatan digitalisasi yang meminimalisir kemungkinan dampak yang timbul dikemudian hari (Pangestika & Sari, 2016). Orang yang paling tepat untuk menilai kelayakan suatu layanan adalah masyarakat umum sebagai penerima layanan publik dari efektivitas penerapan *e-government* pada sistem informasi desa.

Sebagai pemanfaatan penerapan sistem tersebut maka digunakan Sistem Informasi Manajemen Desa Prioritas Utama atau dikenal dengan SIMDESPRIMA, SIMDESPRIMA merupakan salah satu upaya pengembangan sistem informasi desa oleh kementerian Desa, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan yang bekerjasama dengan pihak ketiga dari CV. Sinergi Multi Performa memfasilitasi penyediaan layanan sistem tersebut untuk digunakan setiap desa yang ada di Kabupaten Bintan. Dimana sistem tersebut secara mandiri dikelola oleh pemerintahan desa dan telah digunakan sejak tahun 2019, yang sudah digunakan secara menyeluruh di masing-masing setiap desa yang ada di Kabupaten Bintan. Kemudian pembaharuan kontrak maupun pemutusan kerjasama penggunaan layanan sistem oleh penyedia layanan hanya bisa dilakukan masing-masing desa tanpa melibatkan dinas terkait.

SIMDESPRIMA merupakan sistem yang membantu dalam pendataan dan pelaporan profil desa, termasuk data demografi, potensi desa, dan program pembangunan desa. Sistem ini juga digunakan dalam pengelolaan pemerintahan desa dan keterbukaan layanan informasi publik untuk

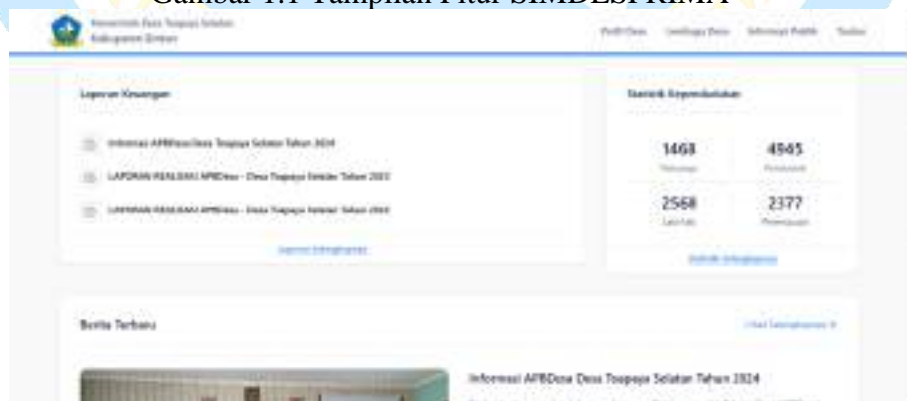
masyarakat umum, dimana sistem ini dirancang untuk membantu desa mengelola data dan informasi dengan lebih efektif dan efisien, inovasi penting yang diperkenalkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan di tingkat desa. Akses pada sistem ini dibuka untuk umum dengan tujuan sebagai memudahkan pendataan dan pemutakhiran data desa, membantu perencanaan pembangunan desa, meningkatkan transparansi pengelolaan desa, serta mempermudah monitoring dan evaluasi program desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan. Harapan adanya sistem ini dipergunakan untuk mempermudah pemberian layanan kepada masyarakat dalam bentuk transparansi informasi kepada publik dan sebagai dasar penilaian kinerja perangkat desa berdasarkan penggunaan sistem. Pentingnya penggunaan teknologi untuk memberdayakan masyarakat dan perangkat desa yang dapat meningkatkan standar pelayanan publik. Adanya SIMDESPRIMA, diharapkan pengelolaan desa dapat dilakukan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Hal ini juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penerapan *e-government* berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*.

SIMDESPRIMA dimaksudkan untuk mengelola data dan informasi publik secara terpadu serta layanan kegiatan di tingkat desa di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Namun, setidaknya ada tiga poin yang menjadi perhatian pada penerapan penggunaan sistem ini. Pertama tingkat

literasi digital terkait pengetahuan ataupun pemahaman pengguna sistem, kedua kualitas kinerja pemerintah desa sebagai pengelola sistem, dan ketiga terkait keterbatasan infrastruktur yang berhubungan dengan akses telekomunikasi suatu daerah, serta kemampuan pada sistem yang dimana beberapa fitur layanan tidak bisa akses, termasuklah dengan akses layanan mandiri berbasis online tidak bisa dilakukan.

Sistem Informasi Manajemen Desa Prioritas Utama (SIMDESPRIMA) adalah situs *web* yang disediakan digunakan untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh desa, seperti pengelolaan keuangan desa, pembagian bantuan, dan musyawarah desa. Situs *website* ini juga menyediakan informasi tentang desa di yang ada di Kabupaten Bintan. SIMDESPRIMA akan membuat masyarakat dan pengguna aplikasi lebih mudah mendapatkan informasi dan layanan tanpa harus mengunjungi desa terkait. Berikut merupakan tampilan situs *web* SIMDESPRIMA:

Gambar 1.1 Tampilan Fitur SIMDESPRIMA



Sumber: SIMDESPRIMA Desa Toapaya Selatan, 2025)

Gambar di atas mengilustrasikan beberapa fitur SIMDESPRIMA, yang meliputi:

1. **Profil Desa** yaitu merupakan layanan informasi berupa Sejarah Desa, Data Pokok Desa, Potensi Desa, Statistik IDM, dan Pemerintahan Desa.
2. **Lembaga Desa** yaitu merupakan layanan informasi terkait lembaga kemasyarakatan desa berupa RT, RW, LPMD, PKK, Karang Taruna, LINMAS dan Posyandu.
3. **Informasi Publik** yaitu merupakan layanan informasi terbuka atau umum yang dapat diakses dan diketahui oleh pengguna layanan seperti Berita, Pengumuman, Dokumen, Produk Hukum, Data Statistik, dan Laporan Keuangan.
4. **Tautan** yaitu merupakan informasi layanan dalam sistem berbasis digital untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan desa seperti e-BUMDes, E-Kinerja, dan Layanan Mandiri.

Pemerintah desa sebagai tingkat pemerintahan terendah di Indonesia, memberikan gambaran tentang *good government*. Sistem Informasi Manajemen Desa Prioritas Utama (SIMDESPRIMA) menjadi sangat penting bagi desa. SIMDESPRIMA dimaksudkan untuk dapat meningkatkan komunikasi pemerintah antara masyarakat dan sektor industri. Memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dirancang oleh pemerintah itu sendiri. Sistem monitoring yang ditawarkan berupa pengelolaan kinerja layanan di desa berbasis digitalisasi dan informasi dengan akses yang *simple* dan akurasi. Menyediakan layanan berupa informasi kegiatan desa, dalam bentuk

artikel ataupun sebuah dokumen digital lainnya, sesuai yang diperlukan bagi pengguna layanan. Setiap desa di Kabupaten Bintan telah menerapkan SIMDESPRIMA dengan baik sebagai sarana untuk menerapkan *e-government*. Data statistik pengunjung berikut menunjukkan efektivitas penggunaan SIMDESRPIMA:

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Pengguna SIMDESPRIMA

| No. | Kecamatan | Desa | Kunjungan Total | Akumulasi |
|-----|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| 1 | Bintan Timur | Air Gelubi | 5.463 | 6.193 |
| | | Kelong | 9.533 | |
| | | Mapur | 4.488 | |
| | | Numbing | 5.288 | |
| 2 | Bintan Utara | Lancang Kuning | 5.463 | 5.463 |
| 3 | Gunung Kijang | Gunung Kijang | 6.535 | 5.741 |
| | | Malang Rapat | 4.596 | |
| | | Teluk Bakau | 6.093 | |
| 4 | Mantang | Mantang Baru | 4.564 | 4.545 |
| | | Mantang Lama | 3.854 | |
| | | Mantang Besar | 5.730 | |
| | | Dendun | 4.035 | |
| 5 | Sri Kuala Lobam | Busung | 5.032 | 4.998 |
| | | Kuala Sempang | 6.161 | |
| | | Teluk Sasah | 3.801 | |
| 6 | Tambelan | Batu Lepuk | 4.246 | 3.913 |
| | | Kampung Melayu | 4.484 | |
| | | Kampung Hilir | 4.740 | |
| | | Mentebung | 3.686 | |
| | | Pulau Pinang | 3.551 | |
| | | Kukup | 2.773 | |
| | | Pengikik | 3.916 | |
| 7 | Teluk Sebong | Berakit | 5.390 | 5.220 |
| | | Ekang Aculai | 7.989 | |
| | | Pengundang | 4.940 | |
| | | Sebong Lagoi | 4.258 | |
| | | Sebong Perh | 4.224 | |
| | | Sri Bintan | 4.519 | |
| 8 | Teluk Bintan | Bintan Buyu | 5.358 | 5.553 |

| | | | | |
|---|---------|-----------------|--------|-------|
| | | Pangkil | 4.208 | |
| | | Penaga | 10.045 | |
| | | Pengujan | 4.277 | |
| | | Tembeling | 3.879 | |
| 9 | Toapaya | Toapaya | 3.424 | 7.310 |
| | | Toapaya Selatan | 6.730 | |
| | | Toapaya Utara | 11.777 | |

Sumber: Statistik Kunjungan SIMDESPRIMA, 2024 (telah diolah kembali)

Berdasarkan dari keseluruhan 36 desa dengan 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan telah menerapkan SIMDESPRIMA sebagai dari penerapan *e-government*. Kecamatan Toapaya merupakan kecamatan yang terdiri dari tiga desa yang menggunakan sistem tersebut yakni Desa Toapaya, Desa Toapaya Utara dan Desa Toapaya Selatan, dengan jumlah statistik kunjungan terbanyak sebesar 7.310 kali akses yang artinya desa yang ada di kecamatan tersebut banyak yang membuka akses maupun menggunakan sistem, dari pemerintahan desanya atau dari masyarakat serta diharapkan telah memahami penggunaan sistem tersebut, sehingga sistem tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan tujuan diuntuknya sistem ini. SIMDESPRIMA diuntuk untuk membantu dalam pengelolaan data dan informasi publik dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Meskipun teknologi telah digunakan, belum ada penelitian menyeluruh yang menilai manfaat *e-government*, terutama SIMDESPRIMA, dalam meningkatkan pengelolaan desa. Namun, *e-government* memiliki potensi besar untuk meningkatkan sistem pemerintahan desa berbasis digital. Efektivitas penerapan sistem ini terhambat oleh sejumlah masalah, seperti kurangnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur, hingga kendala dalam pengelolaan

data. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan studi komprehensif tentang efektivitas penerapan SIMDESPRIMA di Kecamatan Toapaya, dengan tujuan untuk memahami sejauh mana sistem ini diterapkan, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam prosesnya. Maka dari itu, penelitian yang akan dibahas oleh peneliti dengan judul **Efektivitas Penerapan *E-Government* Pada Sistem Informasi Manajemen Desa Prioritas Utama (SIMDESPRIMA) di Kecamatan Toapaya.**

1.2 Rumusan Masalah

Penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini berupa bagaimana efektivitas penerapan *e-government* pada Sistem Informasi Manajemen Desa Prioritas Utama pada ketiga desa yang ada di Kecamatan Toapaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini melihat seberapa efektif penerapan *e-government* di desa-desa yang menggunakan sistem SIMDESPRIMA di Kecamatan Toapaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan *good government* melalui kebijakan *e-government* pada penerapan SIMDESPRIMA.
- b. Memberikan informasi tentang kebijakan *e-government* dan strategi pemerintah untuk meningkatkan sistem informasi pemerintah berbasis teknologi atau digital pada SIMDESPRIMA.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Mengevaluasi peran pemerintah dalam menerapkan dan menjalankan *e-government*.
- b. Mengevaluasi Sistem Informasi Manajemen Desa Prioritas Utama (SIMDESPRIMA) untuk menerapkan kebijakan *e-government* Kecamatan Toapaya dan desa yang ada di Kabupaten Bintan.